

Judul : Pansus RUU Pemilu Dituntut Bekerja Cepat
Tanggal : Sabtu, 29 Oktober 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4



ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Wakil Ketua DPR (dari kiri ke kanan) Taufik Kurniawan, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto berjabat tangan sesuai rapat paripurna penutupan masa sidang I 2016/2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat paripurna tersebut juga mengumumkan susunan anggota Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Pansus RUU Pemilu Dituntut Bekerja Cepat

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang resmi terbentuk kemarin dituntut bekerja cepat. Apalagi, RUU tersebut ditargetkan sudah harus disahkan menjadi UU paling lambat April 2017.

DPR menargetkan pembahasan hanya enam bulan karena penyelenggara pemilu memerlukan waktu minimal 22 bulan untuk mempersiapkan Pemilu 2019.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, waktu yang dimiliki pansus sangat mepet. Dia menyarankan agar DPR melakukan pembahasan RUU meskipun masa reses.

“Mepetnya waktu harus menjadi perhatian penting karena materi yang dibahas sangat banyak. Mendorong pemba-

hasan dalam masa reses,” ujarnya kemarin.

Selain itu, pembahasan oleh pansus perlu diawali dari materi-materi yang krusial, yaitu sistem pemilu, penegakan hukum, dan kelembagaan. “Tiga materi ini menjadi porsi paling penting, yang lainnya mengikut,” lanjutnya.

Meskipun waktu pembahasan terbatas, kata dia, pansus tetap harus membuka seluas-luasnya masukan publik, mengundang pakar-pakar pemilu dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan.

Anggota Pansus RUU Pemilu yang juga Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman meminta agar 30 anggota dari 10 fraksi yang tergabung dalam pansus berkomitmen menyelesaikan RUU tersebut tepat waktu. “Targetnya April tahun depan (2017) UU sudah harus selesai. Semua anggota Pansus harus mengusahakan agar target itu tercapai,” ujarnya kepa-

da *KORAN SINDO* di Jakarta kemarin.

Setelah menetapkan 30 anggota pansus melalui rapat paripurna DPR kemarin, rencananya akan dilakukan rapat pemilihan pimpinan pansus pada 16-17 November 2016. Saat itu, kata Rambe, mekanisme kerja pansus juga sudah harus dibahas. Dia berharap konsolidasi anggota pansus dan pemilihan pimpinan pansus sudah harus selesai pada minggu pertama setelah DPR reses. DPR mulai awal pekan depan reses dan akan kembali pada 15 November 2016.

Setelah itu, pansus akan mengundang pemerintah untuk menjelaskan isi draf RUU yang diusulkan. Agenda berikutnya, masing-masing fraksi mendalami draf dan mengajukan daftar inventaris masalah (DIM).

Dalam rapat paripurna kemarin, 30 nama anggota

pansus diumumkan. Fraksi PDIP memasukkan 6 nama (Arif Wibowo, Erwin Moéslimin, Trimedy Panjaitan, Dyah Pitaloka, Esti Wijayati, Sirmadji), Fraksi Partai Golkar 5 (Rambe Kamarul Zaman, Agung Widyantoro, Hetifah Sjaifudian, Ahmad Zaki, Agun Gunandjar), Fraksi Partai Gerindra 4 (Ahmad Riza Patria, Endro Hermono, Nizar Zahro, Supratman Andi Agtas), Fraksi Partai Demokrat 3 (Edhie Bas-koro Yudhoyono, Didik Mukrianto, Fandi Utomo), Fraksi PAN 3 (Yandri Susanto, Totok Daryanto, Viva Yoga Mauladi).

Sementara itu, Fraksi PKB 2 (Lukman Edy, Neng Eem Marhamah Zulfa), Fraksi PKS 2 (Al-muzammil Yusuf, Sutriyono), Fraksi PPP 2 (Reni Marlinawati, Achmad Baidowi), Fraksi Nas-dem 2 (Tamanhuri, Luthfi Andi Mutty), dan Fraksi Hanura 1 (Rufinus Hotmaulana Hutahuruk).

● kiswondari